

RESILIENSI PETANI WANITA KEPALA KELUARGA MENGHADAPI KRISIS PANGAN

Resilience of Female-Headed Household Farmers Facing Food Crisis

Rizghina Ikhwan dan Sri Suharyono

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Indonesia
*Korespondensi penulis. E-mail: rizghinaikhwan@gmail.com

Naskah diterima: 24 Mei 2023

Direvisi: 18 September 2023

Disetujui terbit: 20 November 2023

ABSTRACT

A food crisis is a disaster that prevents humans from fulfilling their basic needs. On the other side, the increasing position gap between women and men confirms that women are more food insecure than men. This paper discusses the results of a review of some literature and secondary data related to the resilience of women farmers, especially those who are headed households, and their characteristics when facing food crises. The results of this review show that women farmers who are headed households are in the position of informal workers with domestic burdens, the responsibility to meet the family's food needs while producing food. Thus, resilience is carried out by women farmers who have the status of head of household by enabling themselves to improve family welfare. In order to achieve family welfare, land ownership is key in fulfilling household food security. The review results provide insight into the condition of women farmers, especially those who have headed households, so they can pay attention to designing future rural development policies.

Keywords: *female-headed households, food crisis, resilience, women farmer*

ABSTRAK

Krisis pangan merupakan bencana yang menghambat manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sisi lain, kesenjangan kedudukan antara perempuan dan laki-laki yang semakin jauh menegaskan bahwa perempuan lebih rawan pangan dibandingkan laki-laki. Tulisan ini membahas hasil penelusuran sejumlah literatur dan data sekunder yang berkaitan dengan resiliensi petani wanita terutama yang menjadi kepala keluarga serta karakteristiknya dalam menghadapi krisis pangan. Hasil revidi ini menunjukkan bahwa petani wanita yang menjadi kepala keluarga berada di posisi pekerja informal dengan beban domestik, tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan makanan keluarga sekaligus memproduksi makanan. Dengan demikian, resiliensi yang dilakukan petani wanita yang berstatus kepala keluarga, yaitu dengan memampudayakan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Guna mencapai kesejahteraan keluarga, kepemilikan lahan menjadi kunci dalam memenuhi ketahanan pangan rumah tangga. Hasil revidi memberikan wawasan tentang kondisi petani perempuan, khususnya yang menjadi kepala keluarga sehingga menjadi atensi dalam merancang kebijakan untuk pembangunan pedesaan kedepannya.

Kata kunci: *kepala keluarga wanita, krisis pangan, resiliensi, petani wanita*

PENDAHULUAN

Kerawanan pangan saat ini menjadi perhatian dunia sejak bencana kelaparan menempati peringkat tertinggi di tahun 2021. Tercatat antara 702 dan 828 juta orang di dunia menghadapi kelaparan, jumlah tersebut setara dengan 8,9% dan 10,5% dari populasi dunia (FAO et al. 2022). Lebih lanjut, FAO juga menyatakan bahwa di tahun 2021 kelaparan memengaruhi 46 juta orang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020, dan total 150 juta orang lebih banyak sejak 2019 sebelum Pandemi COVID-19. Di sisi lain, dilaporkan bahwa secara global kesenjangan antara perempuan dan laki-laki menguat, dengan

150 juta lebih banyak perempuan yang rawan pangan daripada laki-laki (Suchahyo 2022).

Ringler et al. (2022) telah membuktikan bahwa dampak dari krisis pangan yang bertambah ini cenderung memiliki efek yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. FAO juga menegaskan bahwa inflasi pangan telah mengancam kesejahteraan wanita yang didorong oleh gangguan perang Rusia-Ukraina. Hal tersebut berdampak pada pasokan minyak, gas dan bahan pokok komoditas pangan, termasuk gandum, jagung dan minyak nabati, di samping meroketnya harga pangan, bahan bakar, dan pupuk (UN Women 2022). Ini semakin

menegaskan bahwa perempuan lebih rentan dalam menghadapi krisis pangan.

Salah satu pendorong krisis pangan ialah inflasi pangan. Inflasi pangan yang fluktuatif saat ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim dan pengaruh Pandemi COVID-19 yang kemudian semakin diperparah dengan pecahnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina pada Maret 2022. Konflik Rusia-Ukraina berimbas pada aliran ekspor gandum baik dari Rusia maupun Ukraina yang terhenti sehingga menyebabkan harga komoditas tersebut meningkat tinggi. Dampaknya, pasokan gandum menjadi susah dijangkau oleh sejumlah negara (Reuters 2022). Mengingat, gandum merupakan makanan pokok bagi lebih dari 35% populasi dunia.

Selain itu, Rusia merupakan negara yang berperan besar di pasar pupuk global. Adanya konflik ini, tidak hanya menyebabkan harga makanan yang meningkat, namun juga harga input pertanian seperti makanan ternak, pupuk, pestisida dan bahan bakar menjadi turut meningkat drastis (Arbar 2022). Krisis ini merupakan tantangan terhadap ketahanan pangan bagi banyak negara, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah, yang bergantung pada impor pangan (Sariagri 2022). Dengan demikian, inflasi sangat di pengaruhi oleh harga komoditas pangan pokok dunia.

Dampak yang paling kuat dari inflasi makanan, yaitu kecukupan gizi dan makanan sehat yang semakin melemah. Menurut Rosales and Mercado (2020) ketersediaan pangan atau ketahanan pangan mengindikasikan akses masyarakat terhadap sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia. FAO mencatat, hampir 3,1 miliar orang tidak mampu membeli makanan sehat pada tahun 2020. Jumlah tersebut naik sebanyak 112 juta dari tahun 2019 (FAO 2022). Ini mencerminkan efek inflasi pada harga pangan konsumen yang berasal dari langkah-langkah mengatasi Pandemi COVID-19.

Hingga saat ini, World Bank mencatat antara Januari 2023 hingga April 2023 data inflasi harga pangan menunjukkan nilai yang tinggi di hampir semua negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tingkat inflasi tersebut lebih besar dari 5% pada 64,7% negara berpenghasilan rendah, 83,7% negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan 89% negara berpenghasilan menengah ke atas dan banyak yang mengalami inflasi mencapai dua digit. Selain itu, 81,8% negara berpenghasilan tinggi mengalami inflasi harga pangan yang tinggi. Negara-negara yang paling terpengaruh berada di Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia

Selatan, Eropa, dan Asia Tengah (World Bank 2023).

Beberapa strategi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk juga bagi rumah tangga petani. Petani merupakan individu yang berperan dalam memanfaatkan sumber daya lahan untuk memproduksi bahan makanan, terutama untuk kesejahteraan keluarganya (Rodjak 2006). Menurut FAO, rumah tangga pedesaan di negara berkembang umumnya mencari berbagai strategi mata pencarian untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, sehingga antara kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan seringkali secara bersamaan terlibat dalam banyak aktivitas (FAO 2020). Lebih lanjut, FAO juga mengidentifikasi bahwa kepala keluarga di pedesaan lebih banyak berkontribusi menjadi petani atas usaha mereka sendiri, dari pada menjadi pengusaha yang menjalankan bisnis di luar pertanian hingga menjadi pekerja yang mendapatkan upah. Di sisi lain, ILO menemukan bahwa secara global, perempuan terdiri lebih dari 37% dari tenaga kerja pertanian pedesaan dunia, rasio ini meningkat menjadi 48% untuk negara-negara berpenghasilan rendah, dan kontribusi mereka menonjol di semua subsektor pertanian (ILO 2020). Dengan demikian, kondisi saat ini menunjukkan semakin tingginya daya lenting (resiliensi) petani wanita yang menjadi kepala keluarga untuk meredam dampak, sekaligus beradaptasi untuk menghadapi krisis pangan.

Tulisan ini bertujuan untuk menghasilkan narasi kondisi petani perempuan, khususnya yang menjadi kepala rumah tangga. Sumber data yang diperoleh berasal dari hasil penelusuran literatur, data dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi dampak krisis pangan terhadap petani perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Hasil studi terdahulu di berbagai negara dianalisis untuk melihat pola resiliensi petani perempuan dalam menghadapi krisis pangan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan terkait pembangunan pertanian.

PERAN KEPALA KELUARGA WANITA DI PEDESAAN

Kondisi Kepala Keluarga Wanita di Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati, Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,

atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Selanjutnya, pada ayat 10 mendefinisikan keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pada ayat 11 dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa keluarga berkualitas merupakan agregat dari ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Berkaitan dengan isu pembahasan pada tulisan ini, bahwa suatu keluarga yang berkualitas termasuk yang mampu menghadapi krisis pangan.

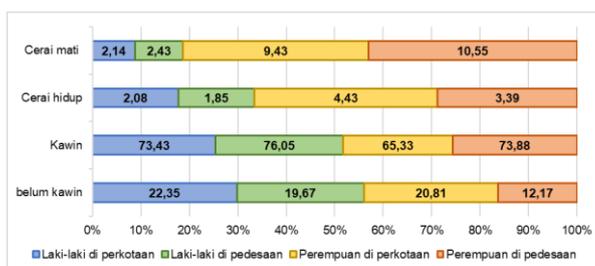
Di sisi lain, jumlah perempuan terus meningkat bahkan mulai menyusul jumlah penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari *sex ratio* Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 0,1 poin dari 102,3 pada tahun 2021 menjadi 102,2 pada tahun 2022 (BPS 2023a). Semakin banyaknya jumlah perempuan menunjukkan semakin besarnya potensi kontribusi perempuan dalam pembangunan. Ini terbukti dari meningkatnya perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja pada tahun 2022 sebanyak 0,06% (Badan Pusat Statistik 2022).

Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021 yang menunjukkan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di pedesaan lebih tinggi (55,20%) dibandingkan dengan perempuan di perkotaan (51,92%). Lebih lanjut, angka tersebut sesuai dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan seminggu yang lalu menunjukkan proporsi perempuan bekerja di pedesaan lebih

tinggi (52,98%) dibandingkan dengan perempuan bekerja di perkotaan (47,94%). Meskipun angka tersebut menunjukkan pola yang sama, terdapat fenomena khusus yang menunjukkan perbedaan berdasarkan status perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

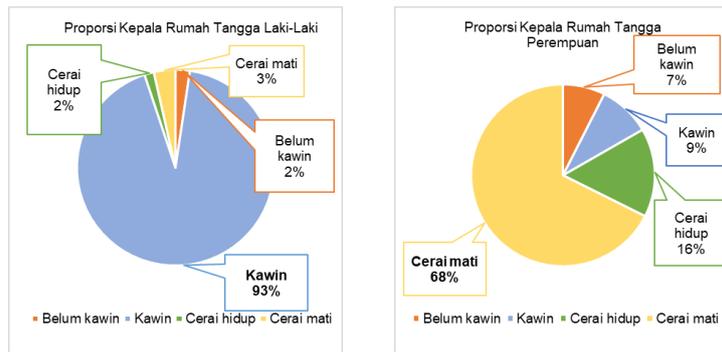
Hasil Sakernas 2021 (Gambar 1) menunjukkan bahwa persentase perempuan bekerja yang berstatus cerai mati (10,55%) maupun cerai hidup (9,43%) lebih tinggi di bandingkan laki-laki dengan status yang sama baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jika dilihat berdasarkan proporsinya, status belum kawin dan kawin baik bagi laki-laki dan perempuan yang bekerja cukup seimbang dibandingkan dengan yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati yang menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus cerai mati atau cerai hidup menghadapi peran ganda, yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga. Peran ganda yang menyebabkan perempuan menjadi kepala keluarga salah satunya, yaitu perpisahan seperti perceraian baik cerai mati atau hidup. Selain itu, status perempuan belum kawin yang menjadi kepala keluarga menunjukkan kondisi tidak memiliki pasangan menjadi kepala rumah tangga.

Bila dilihat dari jam kerja, laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan pada curahan waktu kerja. Salmah et al. (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Lombok Timur menemukan bahwa waktu yang dihabiskan oleh perempuan kepala keluarga yang bekerja di sektor informal lebih lama dari standar jam kerja di Indonesia. Lama kerja perempuan kepala keluarga dipengaruhi oleh pendapatan, umur dan jumlah anak. Sementara itu, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap curahan jam kerja pekerja informal perempuan kepala keluarga. Hal tersebut juga terjadi di Nigeria dalam penelitian Edefe et al. (2023) bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan pertanian daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki, meskipun



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022)

Gambar 1. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut daerah, jenis kelamin, dan status perkawinan, 2021



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022)

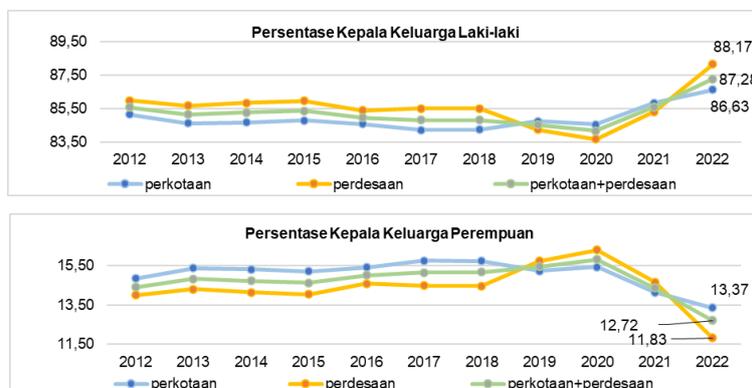
Gambar 2. Persentase kepala rumah tangga menurut status perkawinan dan jenis kelamin, 2021

upah perempuan lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa curahan waktu perempuan yang menjadi kepala keluarga untuk bekerja maupun untuk urusan domestik meningkat. Konsekuensi yang memungkinkan adalah waktu istirahat atau *leisure time* (waktu luang atau waktu senggang setelah segala aktivitas telah dilakukan) berkurang.

Bila dilihat berdasarkan status perkawinan kepala rumah tangga, Sakernas 2021 (Gambar 2) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 proporsi laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga paling tinggi berstatus kawin (93%), sedangkan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di dominasi dengan status cerai mati sebanyak 68%. Di sisi lain, laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga dengan status cerai mati hanya sekitar 3%. Kondisi tersebut menjelaskan posisi perempuan sebagai kepala rumah tangga bagi dirinya sendiri atau rumah tangga yang anggota rumah tangganya belum dewasa atau sudah lansia sehingga perempuan tersebut bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Dengan kata lain, jumlah perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga dan memiliki peran sebagai pencari nafkah utama di dalam rumah tangganya cukup tinggi.

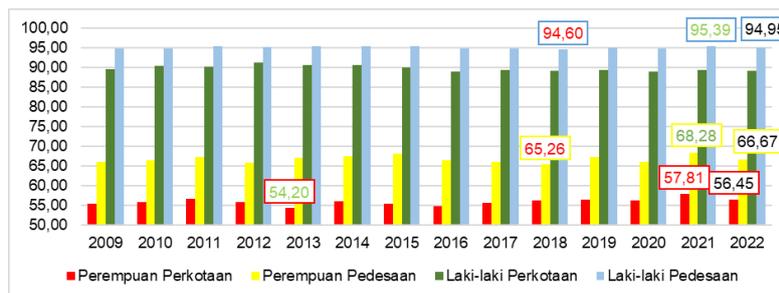
Di lain sisi, bila dilihat selama kurun waktu 10 tahun terakhir, persentase jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di Indonesia (Gambar 3) menunjukkan adanya lonjakan di tahun 2020. Pada tahun tersebut, jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta diiringi dengan jumlah kepala keluarga laki-laki yang menurun drastis. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pandemi COVID-19 yang menunjukkan tingkat kematian penduduk laki-laki (62,3%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (37,7%) di tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19 2021). Situasi tersebut menjadi salah satu indikasi meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di tahun 2020.

Selanjutnya, di tahun 2021 proporsi kepala rumah tangga perempuan di Indonesia mulai menurun baik di perkotaan (14,15%) maupun di pedesaan (14,68%). Hingga di tahun 2022, tercatat jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di perkotaan menurun 0,78% menjadi 13,37%. Hal yang sama juga terjadi di pedesaan dengan penurunan yang lebih besar sebanyak 2,85% atau sejumlah 11,83% perempuan yang menjadi kepala keluarga di pedesaan. Dengan demikian, kondisi kepala keluarga wanita di



Sumber: BPS (2023)

Gambar 3. Persentase jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin di Indonesia, 2012–2022



Sumber: BPS (2023)

Gambar 4. Persentase kepala rumah tangga yang bekerja, berdasarkan jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, 2009–2022

Indonesia saat ini meskipun jumlahnya menurun namun tetap menanggung peran ganda, yaitu mengurus rumah tangga dan bekerja. Terbukti, jumlah perempuan bekerja yang berstatus cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi daripada yang berstatus kawin atau belum kawin, terutama yang berada di pedesaan.

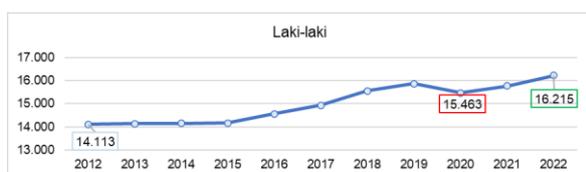
Berdasarkan Gambar 4, selama kurun waktu 14 tahun terakhir jumlah perempuan kepala rumah tangga yang bekerja di perkotaan dan di pedesaan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan laki-laki kepala rumah tangga di perkotaan dan di pedesaan. Pada tahun 2022, perempuan kepala rumah tangga di pedesaan yang bekerja sebanyak 66,67%. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan dari tahun 2021 yang menduduki angka tertinggi selama periode 2009–2022, yaitu sebanyak 68,28% sedangkan angka terendah berada pada tahun 65,26% di tahun 2018. Di sisi lain kepala rumah tangga perempuan di perkotaan yang bekerja, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di pedesaan namun, jumlahnya konsisten meningkat selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2021 yang mencapai 57,81%. Angka tersebut sekaligus yang tertinggi sejak 14 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2022, jumlahnya telah menurun hingga di angka 56,45%. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan di pedesaan banyak yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Guna mendukung analisis tersebut, BPS juga

memiliki data pengeluaran per Kapita berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.

Pada Gambar 5 diketahui pertumbuhan pengeluaran per kapita baik laki-laki maupun perempuan dalam periode 2012 sampai 2022. Selama periode tersebut, pengeluaran per kapita baik laki-laki maupun perempuan konsisten meningkat kecuali pada tahun 2020. Di tahun 2020, pengeluaran per kapita menurun pada nilai Rp15.463 untuk laki-laki dan Rp9.004 untuk perempuan. Hal tersebut mencerminkan salah satu upaya masyarakat dalam menghadapi dampak Pandemi COVID-19.

Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama periode tertentu dan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga serta telah disesuaikan dengan disparitas daya beli (BPS 2023b). Pengeluaran berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri. Data tersebut dapat mengungkap pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan.

Selama kurun waktu 10 tahun, pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi bagi perempuan di tahun 2018 sebesar Rp9.042. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp9.281. Sedangkan untuk laki-laki pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi, yaitu pada tahun 2022 sebanyak Rp16.215. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi, yaitu sebanyak Rp14.991 dan



Sumber: BPS (2023)

Gambar 5. Pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin (ribu rupiah/orang/tahun)

perempuan Rp8.727. Angka tersebut menunjukkan perbedaan pengeluaran per kapita yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan. Komposisi pengeluaran rumah tangga ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dalam arti makin rendah nilai pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahterannya.

Menurut Rosenhouse Persson (1989) dalam Flatø et al. (2017) kerugian ekonomi rumah tangga yang dikepalai perempuan disebabkan oleh tiga alasan utama. Pertama, pendapatan perempuan rata-rata lebih rendah, aset yang dimiliki lebih sedikit dan lebih sedikit akses ke sumber daya produktif seperti tanah, modal keuangan, dan teknologi dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, kondisi ini tidak menguntungkan bagi sebuah rumah tangga untuk menjadikan perempuan sebagai pencari nafkah utama. Kedua, karena tidak ada pencari nafkah laki-laki, kepala rumah tangga perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tunggal sehingga lebih cenderung menanggung beban yang lebih tinggi. Model rumah tangga ini umumnya memiliki rasio non-pekerja lebih banyak dibandingkan pekerja seperti yang ditunjukkan oleh rasio ketergantungan total yang lebih tinggi berdasarkan jumlah tanggungan anak yang banyak dan proporsi lansia yang lebih tinggi. Ketiga, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tanpa bantuan orang dewasa lainnya harus memikul beban ganda di mana mereka harus memenuhi tugas rumah tangga dan peran sebagai pencari nafkah. Akibatnya, kepala rumah tangga perempuan menghadapi kendala waktu dan mobilitas yang lebih besar serta harus bekerja lebih sedikit atau memilih pekerjaan dengan gaji lebih rendah. Kondisi ini membuat rumah tangga yang dikepalai perempuan rentan secara ekonomi terhadap perubahan iklim.

Lebih lanjut, berdasarkan ulasan tiga alasan utama tersebut, akan berpengaruh pada sumber daya. Akibatnya upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dengan tujuan untuk menjaga kecukupan makanan bagi anggota keluarga. Contoh tindakan penanggulangan tersebut seperti menjual aset, mengambil pinjaman, menggunakan tabungan, mengurangi makanan, dan melakukan migrasi.

Dengan demikian, disparitas pendapatan antara rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan telah menjadi pembahasan dan telah diteliti dalam berbagai penelitian sehingga memunculkan sejumlah hipotesis. Beberapa hipotesis yang ditemukan seperti diskriminasi dalam peluang pasar tenaga kerja serta dalam

pengembangan sumber daya manusia, tingkat pendidikan yang lebih rendah, gangguan karir yang disebabkan saat melahirkan anak dan tanggung jawab keluarga lainnya, serta rendahnya mobilitas dalam pekerjaan.

Karakteristik Petani Wanita di Pedesaan

FAO menegaskan bahwa situasi dan kebutuhan perempuan di pedesaan perlu mendapatkan perhatian FAO (2020). Selain itu, perempuan juga memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan gizi karena mereka yang bertanggung jawab atas urusan domestik yang meliputi pertanian, pengolahan makanan, pemasaran dan memastikan konsumsi rumah tangga dan nutrisi (FAO 2011). Perempuan pedesaan seringkali memiliki pengetahuan tentang sumber daya alam, seperti tanah, air dan hutan, karena mereka sering bertanggung jawab atas pengelolaan, tidak hanya dalam peran mereka sebagai petani (FAO 2020). Namun, perempuan pedesaan memiliki potensi untuk mendapatkan pekerjaan berupah rendah, paruh waktu, musiman, tanpa perlindungan hukum atau sosial, dan mereka cenderung dibayar lebih rendah bahkan ketika mereka berpendidikan lebih tinggi dan lebih berkualitas daripada laki-laki.

Bila dilihat dari pandangan neoliberalisme pun, karakter antara petani wanita dan petani laki-laki berbeda. Petani wanita cenderung disinvestasi oleh negara dan korporasi dari kesejahteraan sosial serta eksternalisasi pekerjaan domestik di rumah tangga (Çelik 2023). Namun, dalam pandangan reproduksi sosial, neoliberal juga membawa pergeseran pola rumah tangga bahwa 'laki-laki yang mencari nafkah dan perempuan yang mengasuh' di bawah kapitalisme yang dikelola negara pada abad ke-20 ke 'keluarga berpenghasilan dua' melalui feminisasi tenaga kerja berbayar (Fraser 2017). Pada kenyataannya, terdapat ketergantungan pasar dari kelas-kelas tenaga kerja yang bersifat gender. Bahwa, upah petani wanita lebih rendah dari laki-laki berdasarkan pembagian kerja gender (Vercillo 2020). Hal tersebut yang mendefinisikan petani wanita sebagai petani subsisten yang bergantung pada pasar baik dalam memproduksi maupun mengkonsumsi makanan (Shiva 2016). Hal ini yang memberikan pengaruh pada partisipasi angkatan kerja perempuan di pedesaan.

Kondisi ini juga telah dikemukakan oleh FAO sejak tahun 2017, bahwa perempuan pedesaan menyumbang satu dari empat orang di dunia dan rata-rata hampir setengah dari angkatan kerja pertanian di negara-negara berkembang (UN

FAO 2017). Jumlah tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Khed and Krishna (2023) bahwa sebanyak 43% angkatan kerja pertanian di negara berkembang adalah perempuan. Dengan demikian, karakter petani perempuan di pedesaan merupakan pekerja informal yang tidak memiliki jaminan upah yang memadai. Selain itu, waktu dan tenaga terbagi untuk menyiapkan makanan, mengerjakan urusan domestik dan memproduksi makanan.

PETANI WANITA KEPALA KELUARGA DALAM MENGHADAPI KRISIS PANGAN

Potensi Petani Wanita Kepala Keluarga Mengalami Krisis Pangan di Dunia

Krisis pangan merupakan suatu keadaan ketika masyarakat tidak dapat mengakses makanan yang cukup, aman, dan bergizi serta preferensi makanan yang lebih sehat (Phillips and Taylor 1990 dalam DeWalt 2020). Pemerintah Indonesia mendefinisikan krisis pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagai kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan antara lain oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Sebaliknya, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sementara, menurut FAO (2015) ketahanan pangan merupakan situasi bagi semua orang yang setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi untuk makanan yang cukup, aman dan bergizi dan memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat. Dengan demikian, ketahanan pangan dan krisis pangan bersifat dinamis, timbal balik dan tergantung pada situasi. Situasi tersebut bergantung pada interaksi antara tekanan krisis pangan dan strategi untuk menghadapinya. Selain itu, ketahanan pangan bergantung pada faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi akses dan keterjangkauan pangan yang menunjukkan bahwa korelasi ketahanan pangan kemungkinan besar ditemukan di tingkat rumah tangga dan individu (Wineman 2016).

Di beberapa negara ditemukan bahwa petani wanita yang menjadi kepala rumah tangga lebih rawan mengalami krisis pangan dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki. Survei yang dilakukan oleh Mebratu (2018) di Etiopia bagian Barat Daya pada 122 sampel rumah tangga petani, menunjukkan 57 % yang dikepalai oleh perempuan rawan pangan, sedangkan hanya 18 % rumah tangga yang dikepalai laki-laki mengalami rawan pangan. Hasil tersebut juga sejalan dengan kondisi di Etiopia Selatan dengan jumlah sampel yang lebih besar, yaitu 383 kepala rumah tangga menemukan bahwa 68,4 % berada pada kondisi rawan pangan dengan analisis regresi logistik biner yang menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kerawanan pangan dibandingkan rumah tangga yang dikepalai perempuan di pedesaan (Assefa and Abide 2023). Kondisi tersebut dijelaskan karena adanya aturan dan praktik adat yang memiliki efek restriktif bagi perempuan melalui pembatasan akses ke sumber daya dan peran perempuan dalam produksi, persiapan, pengolahan, distribusi, dan kegiatan pemasaran pangan sehingga mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi perempuan.

Selain itu kerawanan pangan di Etiopia Selatan juga dijelaskan Beyene et al. (2023) melalui pengukuran indeks ketahanan pangan. Hasilnya, pada wilayah agroekologi jenis kelamin kepala keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan rumah tangga. Perempuan yang menjadi kepala keluarga tidak memiliki akses terhadap sumber keuangan dan terbatas dalam jenis mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta mempertahankan mata pencariannya. Hal ini terkait dengan rendahnya kapasitas adaptasi perempuan, kurangnya modal, dan kerentanan. Keterbatasan ini yang menjadi pencetus kerawanan pangan bagi rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

Survei rumah tangga petani di Nigeria Selatan pada 500 sampel juga menyatakan rumah tangga yang dikepalai laki-laki memiliki peluang 2,6 kali untuk tahan pangan dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai perempuan (Zakari et al. 2014). Selain itu, Biro Sensus Brazil juga melakukan Survei Rumah Tangga Nasional pada tahun 2009 dengan sampel perwakilan dari 121.708 rumah tangga menemukan bahwa kerawanan pangan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih tinggi (32 %) dibandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (16 %). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa potensi kerawanan pangan meningkat dengan

kehadiran anak-anak berusia 0–10 tahun dan remaja berusia 11–18 tahun (Felker-Kantor and Wood 2012 dalam Gebre and Rahut 2021). Selain itu, ditemukan bahwa pola pengeluaran perempuan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan anak dan anggota rumah tangga lainnya.

Studi komparasi status ketahanan pangan rumah tangga petani laki-laki dan perempuan di Imo State, Nigeria yang dilakukan oleh Ibeagwa et al. (2020) telah mengeksplorasi lebih luas. Ditemukan bahwa meskipun perempuan yang menjadi rumah tangga menghasilkan lebih banyak makanan, namun rumah tangga yang dikepalai oleh lebih terjamin pangannya. Tingkat pendidikan, ukuran aset pertanian, pendapatan dan penyusutan total aset adalah variabel kunci yang memengaruhi secara positif kepala rumah tangga laki-laki lebih menjamin makanan anggota keluarganya. Di sisi lain, pengalaman bertani, kepemilikan aset pertanian, dan keikutsertaan dalam organisasi dan kelembagaan merupakan variabel kunci yang mempengaruhi secara positif probabilitas ketahanan pangan pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.

Survei rumah tangga oleh Ndobo and Sekhampu (2013) di Kotapraja Kwakwatsi, Afrika Selatan menggunakan model regresi berganda yang diestimasi berdasarkan data status ketahanan pangan rumah tangga (skor akses kerawanan pangan rumah tangga) juga menemukan permasalahan yang sama. Ditemukan bahwa sekitar 49% rumah tangga sampel rentan terhadap kerawanan pangan. Kerawanan pangan lebih banyak terjadi pada rumah tangga yang dikepalai perempuan (63,8%) dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (42,9%). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki, kerentanan kerawanan pangan meningkat seiring bertambahnya usia kepala rumah tangga namun, akan menurun dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan status pekerjaan kepala rumah tangga. Di sisi lain, rumah tangga yang dikepalai perempuan kerentanan terhadap kerawanan pangan meningkat dengan status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga dan usia kepala rumah tangga, serta menurun dengan pendapatan rumah tangga.

Di Pakistan, survei juga dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan di pedesaan. Dari hasil wawancara pada 294 rumah tangga pedesaan ditemukan bahwa usia, jenis kelamin, pendidikan, remitansi (transfer uang dari pekerja migran), pengangguran, inflasi, aset, dan

penyakit merupakan faktor penting yang menentukan kerawanan pangan rumah tangga di pedesaan. Diantara faktor-faktor tersebut, jenis kelamin merupakan faktor yang paling dominan dalam kerawanan pangan karena wanita yang menjadi kepala rumah tangga lebih rawan pangan dibandingkan laki-laki sehingga perlu adanya kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada kepala rumah tangga wanita di pedesaan dan mendorong masuknya remitansi (Abdullah et al. 2019). Yang menarik dari temuan ini, faktor remitansi merupakan salah satu arus uang terbesar di negara berkembang. Remitansi menjadi selalu menjadi salah satu sumber penting pendapatan dan keuangan eksternal bagi sebagian besar masyarakat miskin di negara berkembang dan sumber pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bagi negara. Bahkan, remitansi sumber pendapatan asing terbesar kedua setelah ekspor di Pakistan.

Penelusuran literatur pada negara-negara diatas (Etiopia, Nigeria, Afrika Selatan dan Pakistan) menunjukkan bahwa kerawanan pangan masih menjadi isu global. Berfokus pada dampaknya bagi kepala rumah tangga perempuan, jika ditarik benang merahnya, faktor utama kerawanan pangan disebabkan oleh pembatasan akses ke sumber daya seperti modal dan kepemilikan aset pertanian. Bahkan, kondisi semakin diperparah saat Pandemi COVID-19 yang menyebar hampir di seluruh dunia.

Dampak dari Pandemi COVID-19 juga telah menguncang ketahanan pangan rumah tangga. Akalu and Wang (2023) melakukan survei pada 5374 rumah tangga di Etiopia menemukan hampir 27% rumah tangga menghadapi krisis pangan di tingkat sedang dan sebanyak 6 % rumah tangga berada dalam kondisi parah. Pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan efek yang tidak proporsional terhadap ketahanan pangan antara kepala keluarga laki-laki dan kepala keluarga perempuan. Diindikasikan bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat ditemukan secara signifikan lebih tinggi daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Pendidikan ditengarai menjadi penentu penting untuk kerawanan pangan rumah tangga yang dikepalai perempuan. Hal ini terbukti dari setiap penambahan tahun pendidikan lebih berdampak dalam mengurangi kemungkinan mengalami kerawanan pangan bagi rumah tangga yang dikepalai perempuan daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Dampak dari Pandemi COVID-19 tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga di

negara maju seperti Amerika Serikat. Wolfson and Leung (2020) telah melakukan survei nasional berbasis web pada masyarakat yang berada di golongan lebih dari 250% di garis kemiskinan AS. Sebanyak 1478 orang menjadi sampel dalam survei ini menunjukkan temuan yang menarik. Secara keseluruhan sebanyak 36% masyarakat berpenghasilan rendah di AS aman pangan, sedangkan 20% memiliki ketahanan pangan marjinal, dan 44% rawan pangan. Selain itu, 18,8% masyarakat dengan ketahanan pangan yang sangat rendah dilaporkan mampu mematuhi rekomendasi kesehatan masyarakat untuk membeli makanan selama dua minggu sekaligus. Efek jangka pendek dari Pandemi COVID-19 memperbesar kesenjangan yang ada dan secara tidak proporsional memengaruhi rumah tangga berpenghasilan rendah dan rawan pangan yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum adanya Pandemi COVID-19.

Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai dampak Pandemi COVID-19 bagi ketahanan pangan rumah tangga petani berdasarkan jenis kelamin kepala keluarga masih belum dilakukan. Namun, secara umum dari penelitian-penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di beberapa daerah di Indonesia. Wulandari et al. (2021) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan rumah tangga sebelum dan saat Pandemi COVID-19 di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berdasarkan sampel acak pada 20 kepala keluarga, menunjukkan tingkat konsumsi energi yang bersumber dari beras rata-rata 888,46 Kalori/orang/hari. Jumlah ini hanya mencapai 44,42% dari Angka Kebutuhan Energi (AKE), yaitu sebesar 2000 Kalori/orang/hari. Selain itu, sebelum Pandemi COVID-19 ditemukan sebanyak 10% masuk dalam kategori rumah tangga rawan pangan sedangkan pada masa Pandemi COVID-19 meningkat menjadi 30%. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Robbi (2022) yang menemukan perubahan pengeluaran konsumsi rumah tangga di 38 kabupaten/kota Jawa timur akibat Pandemi COVID-19. Ditemukan sebelum terjadi Pandemi COVID-19 pendapatan naik 1% konsumsi naik sebesar 0,5%, namun kemudian selama Pandemi COVID-19 konsumsi turun sebesar 0,043%.

Selanjutnya, penelitian mengenai ketahanan pangan khususnya pada rumah tangga petani dilakukan di daerah dengan jumlah sawah dan total produksi tanaman pangan terbesar kedua di Kota Denpasar, yaitu Subak Sembung, Kecamatan Denpasar Utara. Hasil menunjukkan

pada masa Pandemi COVID-19 sebanyak 22 rumah tangga atau 61,11% berada pada kondisi rentan pangan yang didorong oleh tingkat konsumsi energi yang cukup, namun proporsi pengeluaran pangan rumah tangga masih tergolong tinggi. Faktor signifikan yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani di Subak Sembung pada saat Pandemi COVID-19 adalah pendapatan usaha tani, pendapatan non usaha tani, pengeluaran pangan dan harga beras (Pradnyadewi et al. 2021).

Dengan demikian, temuan di beberapa daerah ini menunjukkan adanya potensi petani wanita di Indonesia yang menjadi kepala keluarga saat ini sedang mengalami krisis pangan. Kondisi ini menyoroti keterkaitan yang erat antara resiliensi dan adaptasi pada situasi krisis pangan saat ini menunjukkan bahwa pentingnya resiliensi telah meningkat pesat (Ackerl et al. 2023). Oleh sebab itu, diperlukan analisis untuk melihat resiliensi petani wanita kepala keluarga di Indonesia dalam menghadapi krisis pangan.

RESILIENSI PETANI WANITA KEPALA KELUARGA MENGHADAPI KRISIS PANGAN

Krisis pangan yang sedang terjadi saat ini menjadikan petani rentan. Kerentanan terjadi karena keterbatasan yang dimiliki petani, seperti keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sarana usahatani, keterbatasan terhadap akses alsintan, keterbatasan akses informasi dan sebagainya. Kerentanan petani juga tidak lepas dari ketergantungan terhadap alam yang sangat tinggi, sementara kondisi alam saat ini tidak dapat diprediksi dan tidak menentu akibat adanya perubahan iklim secara global.

Resiliensi merupakan kebalikan dari kerentanan (*vulnerability*), dimana kedua konsep tersebut laksana dua sisi mata uang (Adger 2000 dalam Sembiring 2024). Resiliensi secara umum dapat berarti beradaptasi dan "bangkit kembali" dari peristiwa yang mengganggu (Longstaff 2010). Peristiwa mengganggu yang dimaksud dapat berwujud bencana yang disebabkan oleh faktor alam, maupun oleh perilaku manusia. Resiliensi merujuk pada kemampuan dalam menghadapi, mencegah dan meminimalkan dampak dari permasalahan yang mengganggu kondisi normal sehingga bisa pulih kembali, baik dalam tataran individu ataupun komunitas masyarakat. Resiliensi merupakan suatu proses yang dinamis, mencakup adaptasi yang positif saat terjadi bencana (Sembiring dan Darmawan, 2014). Dengan demikian cakupan resiliensi

melingkupi kondisi sebelum, ketika dan sesudah bencana terjadi. Apabila resiliensi berada sebelum bencana terjadi, bentuknya berupa mitigasi, sedangkan resiliensi pascabencana terjadi itu merupakan suatu *recovery*.

Speranza et al. (2014) menyebutkan ada tiga indikator utama untuk memahami konsep resiliensi, yaitu kapasitas penyangga (*buffer capacity*), kemampuan organisasi diri (*self-organisation*), dan kapasitas belajar (*capacity for learning*). Secara lebih rinci, ketiga indikator resiliensi tersebut dapat diuraikan menjadi tingkat pendidikan, lama bertani, pendapatan, tabungan, pengeluaran, kondisi kesehatan, *dependency ratio*, dan keanggotaan organisasi di masyarakat. Lebih lanjut, dalam resiliensi, setiap masyarakat atau individu memiliki cara berorganisasi, kemampuan belajar, dan mengetahui ancaman dan peluangnya.

Tingkatan kerentanan dan resiliensi dapat juga ditentukan oleh jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sangat berkontribusi terhadap tingkat resiliensi dan kerentanan pada seseorang. Seperti yang dikemukakan Ghafur et al. (2012) bahwa tingkat kerentanan dan resiliensi ditentukan juga oleh jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan berkontribusi terhadap resiliensi dan kerentanan seseorang. Lebih lanjut Ghafur et al. (2012) menjelaskan walaupun perempuan cenderung lebih rentan terhadap dan diabaikan dalam penanganan bencana seperti yang terjadi di Aceh, banyak perempuan yang menjadi korban, tetapi pada sisi lain perempuan memiliki daya tahan yang luar biasa dalam masa-masa sulit seperti gempa. Daya tahan perempuan ini didorong oleh adanya sifat dalam diri perempuan yang pertama, cenderung berusaha menyembuhkan dirinya dan sekaligus menolong sesamanya di dalam masa kritis. Kedua, sifat-sifat keperempuanan yang terbentuk, dengan karakter tekun, sabar, rajin, melayani, dan sebagainya mampu memberikan pelayanan baik di sektor keluarganya maupun di sektor publik.

Selain itu, Amalia et al. (2015); Sembiring dan Darmawan (2014) menyatakan bahwa jenis kelamin menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada resiliensi. Dalam rumah tangga petani, faktor yang memengaruhi resiliensi yaitu, jenis kelamin kepala rumah tangga, tingkat modal finansial, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, tingkat kepercayaan pada jaringan, dan tingkat penguasaan aset. Semakin tinggi tingkat penguasaan aset, maka semakin tinggi tingkat resiliensi rumah tangga. Hal tersebut sama dengan pendapatan rumah tangga, semakin

tinggi pendapatan rumahtangga, maka semakin tinggi tingkat resiliensinya.

Tingkat resiliensi yang tinggi akan memberikan tingkat kesiapsiagaan yang tinggi bagi masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Tingkat resiliensi juga bisa menentukan bagaimana cara melakukan pertahanan atau bangkit dalam merespon bencana yang terjadi. Oleh karena itu, individu atau masyarakat yang tingkat resiliensinya rendah, mereka tidak hanya rentan akan terkena bencana, tetapi mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan untuk bisa melakukan perlawanan dan kesusahan untuk bangkit setelah peristiwa bencana yang menimpa.

Sementara itu, menurut Cutter (2008) dalam Rao and Enelamah (2023) tingkat resiliensi seseorang memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan tempat dan kondisi ekologis, dimana kondisi yang rentan terhadap bencana seperti bencana alam yang melanda merupakan faktor yang menurunkan tingkat resiliensi seseorang ataupun komunitas. Hal ini berbeda dengan seseorang yang tinggal pada daerah yang jauh akan terjadinya peristiwa bencana. Krisis pangan yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya adalah karena faktor alam, yakni adanya perubahan iklim. Kondisi ini membuat petani secara umum, maupun petani wanita kepala keluarga khususnya harus mampu bertahan dan tetap resilien.

Penelitian mengenai resiliensi petani dalam menghadapi bencana alam di Indonesia, sudah banyak dilakukan, dan hasilnya menunjukkan beberapa keragaman bentuk resiliensi yang dilakukan petani dalam menghadapi bencana. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Andini et al. (2020) mengenai resiliensi petani di Negeri Latahalat Ambon. Hasil penelitian menemukan bahwa petani melakukan berbagai strategi nafkah, pertanian dan non pertanian dalam upaya mempertahankan penghidupannya.

Penelitian lainnya yang dilakukan Mariyani et al. (2019) mengenai ketahanan masyarakat petani padi tadah hujan terhadap ancaman kerawanan pangan akibat perubahan iklim di Lampung Selatan. Penelitian ini menemukan beberapa strategi resiliensi yang dilakukan petani dalam upaya mengatasi ancaman kerawanan pangan dengan membangun jaringan kapasitas adaptif, khususnya modal sosial, dan mengelola sumber dayanya.

Marseva et al. (2016) melakukan penelitian di Desa Wanasari, Brebes menemukan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dari panen sebelumnya, lama bertani, dan pekerjaan dummy lainnya mempengaruhi ketahanan rumah

tangga petani. Resiliensi yang dilakukan adalah dengan beradaptasi untuk bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adaptasi yang dilakukan petani di Desa Wanasari, Brebes, dilakukan dengan mengubah masa tanam, mengganti pupuk, mengurangi dosis pupuk, dan mengganti bibit. Pada saat yang sama, adaptasi dalam mata pencarian adalah memiliki pekerjaan lain melalui penangkapan ikan dan pekerjaan di luar pertanian.

Penelitian tentang resiliensi petani yang fokus pada petani wanita pernah dilakukan oleh Riswan dan Arifika (2012) yang melihat tentang dampak erupsi Merapi bagi petani wanita. Menurutnya, wanita dengan segala faktor alamiahnya yang lebih dekat dengan alam diyakini memiliki kesamaan sifat, yaitu memberi, sehingga sawah dan lahan pertanian pun menjadi "ruang" yang cocok bagi perempuan untuk bekerja karena pertanian tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik semata. Sementara itu, sungai, jalan, dan pertambangan pasir adalah wilayah yang berisiko tinggi bagi fisik perempuan. Pasca erupsi Merapi, perempuan semakin banyak yang masuk ke wilayah ini karena tertutupnya lahan pertanian dengan abu Merapi dan perubahan pola hidup bisa dilihat dari kondisi alih profesi ini.

Penelitian Azzahra et al. (2017) menemukan bahwa resiliensi petani wanita dalam menghadapi ekspansi kelapa sawit dilakukan melalui perubahan kerja. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan terjadinya perubahan kerja wanita dari domestik menjadi ke ranah publik sebagai upaya untuk menambah penerimaan rumah tangga. Berdasar pada beberapa hasil penelitian diatas, terlihat bahwa resiliensi petani wanita dalam menghadapi guncangan ekonomi yang disebabkan factor alam maupun perilaku manusia ditempuh melalui strategi diversifikasi nafkah. Perluasan sumber pendapatan keluarga dilakukan supaya petani bisa tetap bertahan menghadapi bencana termasuk krisis pangan. Menggunakan strategi perbedaan dalam perbedaan, (Kumar and Quisumbing 2013) menemukan bahwa krisis harga pangan tahun 2007–2008 berdampak lebih besar pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki di pedesaan Etiopia, dan bahwa yang pertama mengatasi krisis secara lebih luas dengan mengurangi konsumsi makanan langsung. rumah tangga yang dikepalai laki-laki lajang sangat rentan. Sebuah studi baru-baru ini menggunakan data panel yang dikumpulkan di pedesaan bagian timur laut Afrika Selatan menunjukkan bahwa rumah tangga yang

dikepalai oleh laki-laki dan perempuan mengalami pengurangan konsumsi setelah kegagalan panen terkait cuaca yang dilaporkan sendiri (Tibesigwa et al. 2015). Namun, secara de facto perempuan kepala keluarga tampaknya kurang rentan berkat kiriman uang dari suami migran.

Peningkatan akses ke lahan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga (Nnaji et al. 2022). Meskipun, pendapatan dari lahan yang dimiliki ternyata lebih tinggi dari lahan yang disewa. Keamanan dari konflik lahan memengaruhi hak kepala rumah tangga untuk menggunakan, mengelola, dan mengontrol lahan dan sumber dayanya. Hal ini memiliki dampak yang jelas dan positif terhadap hak atas lahan, produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan rumah tangga.

Menurut Sasson (2012), total produksi pangan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi ketahanan pangan negara berkembang. Dengan demikian, jaminan kepemilikan dan luasan lahan yang diakses merupakan kunci dalam menentukan pengaruh akses lahan terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Disparitas akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan dapat menjadi pembeda antara rumah tangga tahan pangan dan rawan pangan sedangkan variasi kemampuan antara kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan yang berbeda untuk mengakses lahan akan berdampak lebih jauh pada ketahanan pangannya. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan sebuah analisis efek interaksi dari istilah interaksi "gender-lahan" yang menunjukkan bahwa dengan peningkatan akses lahan seluas 1 hektare, memungkinkan rumah tangga yang dikepalai perempuan menjadi rawan pangan berkurang sekitar 16%, dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Namun, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa untuk beberapa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, akses besar ke lahan tidak berpengaruh pada status ketahanan pangan mereka. Hal tersebut memungkinkan karena mereka tidak memiliki sarana dan sumber daya untuk mengolah lahan agar produktif.

Hubeis (2010) menyatakan bahwa peran wanita dalam dukungan dan kesempatan wanita untuk mendapatkan pekerjaan sangat strategis dalam memampudayakan wanita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, penyediaan kesempatan kerja kepada wanita memiliki nilai tambah dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Selain sektor pekerjaan formal, sektor pekerjaan informal yang dapat diciptakan oleh program pemberdayaan juga bermanfaat bagi perempuan. Cara rumah

tangga mengatasi dan menahan guncangan ekonomi ditentukan oleh kemampuannya, modal (termasuk fisik dan non fisik/sosial), dan kegiatan yang tersedia, yaitu strategi penghidupan rumah tangga (Ellis 1998 dalam Kassegn and Abdinasir 2023) Selain itu, perbedaan status sosial-ekonomi, aset, dan akses ke sumber daya yang tidak merata dari berbagai rumah tangga berimplikasi pada kekuatan, tingkat paparan risiko, dan kemampuan untuk mencegah, memitigasi, atau mengatasi risiko untuk hasil penghidupan yang lebih baik di antaranya adalah ketahanan pangan yang lebih baik (Ogunniyi et al. 2021).

PENUTUP

Resiliensi petani wanita kepala keluarga dalam menghadapi krisis pangan memerlukan upaya untuk membuat pangan terjangkau melalui harga yang terkontrol dan peningkatan keuangan rumah tangga secara berkelanjutan dengan skema bantuan sosial. Hal ini dapat didukung dengan mengurangi beban kerja petani wanita kepala keluarga melalui peningkatan akses ke teknologi, praktik dan infrastruktur. Peningkatan produktivitas akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang dapat diterjemahkan ke dalam daya beli yang tinggi sehingga akan meningkatkan pengeluaran pangan dan pada akhirnya mengurangi kerawanan pangan. Di sisi lain, kepemilikan aset, terutama lahan menjadi kunci dalam mengakses ketahanan pangan rumah tangga melalui peningkatan produktivitas lahan. Wawasan ini dapat membantu dalam merancang kebijakan untuk pembangunan pedesaan dengan memberikan perhatian khusus bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam mengumpulkan literasi sebagai bahan tulisan hingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Zhou D, Shah T, Ali S, Ahmad W, Din IU, Ilyas A. 2019. Factors affecting household food security in rural northern hinterland of Pakistan. *J. Saudi Soc. Agric. Sci.* 18(2):201–210.

Ackerl T, Weldemariam LF, Nyasimi M, Ayanlade A. 2023. Climate change risk, resilience, and adaptation among rural farmers in East Africa: A literature review. *Regional Sustainability.* 4(2):185–193.

Akalu LS, Wang H. 2023. Does the female-headed household suffer more than the male-headed from Covid-19 impact on food security? Evidence from Ethiopia. *J Agric Food Res.* 12:100563.

Amalia R, Dharmawan AH, Putri EIK. 2015. Perubahan lanskap ekologi dan resiliensi nafkah rumah tangga petani di sekitar hutan di Kalimantan Timur. *Sodality.* 3(3), 121-127.

Andini NM, Pattiselanno AE, Kaplale R. 2020. Resiliensi nafkah petani di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *Agrilan,* 8(2).

Arbar TF. 2022. Bos FAO Buka-bukaan soal krisis pangan, semengerikan apa? [Internet]. Jakarta (ID): CNBC Indonesia. [cited 2022 Oct 21]. Available from: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220715163040-4-356035/bos-fao-buka-bukaan-soal-krisis-pangan-semengerikan-apa>.

Assefa T, Abide EB. 2023. Determinants of food insecurity in rural households: A case of lemo district, southern Ethiopia. *Heliyon.* 9(1): e12764.

Azzahra F, Dharmawan AH, Pandjaitan NK. 2017. Perempuan dan resiliensi nafkah rumahtangga petani sawit: analisis dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, *Sodality.* 25-35.

Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Beyene F, Senapathy M, Bojago E, Tadiwos T. 2023 Jan 21. Rural household resilience to food insecurity and its determinants: Damot Pulasa district, Southern Ethiopia. *J Agric Food Res.:*100500.

BPS. 2023a. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. 2023b. Konsumsi dan Pengeluaran. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Çelik C. 2023. Global food insecurity as a crisis of social reproduction for the classes of labour. *Human Geography.*

DeWalt M. 2020. Food Insecurity and Socially Responsible For-Profit Entities.

Edafe OD, Osabuohien E, Matthew O, Osabohien R, Khatoon R. 2023. Large-scale agricultural investment and female employment in African communities: Quantitative and qualitative insights from Nigeria. *Land use policy.* 127:106579.

FAO WFP. 2015. IFAD (2012) The state of food insecurity in the world 2012. Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition Rome, FAO.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO. 2022. The State of

- Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable.
- FAO. 2011. State of Food and Agriculture 2010-11: Women in Agriculture-Closing the Gender Gap for Food & Agriculture Organi. [Internet]. Rome:(IT). [cited 2023 May 23]. Available from: <http://www.fao.org/3/a-i2050e.pdf>.
- FAO. 2020. FAO policy on gender equality 2020-2030. [internet]. Rome:(IT). [cited 2023 May 23] Available from: <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>.
- FAO. 2022. 50th Session of Committee on World Food Security opens amid multiple challenges to global food security and nutrition [internet]. [cited 2022 Oct 21]. Available from: <https://www.fao.org/newsroom/detail/50th-session-of-committee-on-world-food-security-opens-amid-multiple-challenges-to-global-food-security-and-nutrition/en>.
- Flatø M, Muttarak R, Pelsler A. 2017. Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa. *World Dev.* 90:41–62.
- Fraser N. 2017. Crisis of care? On the social-reproductive contradictions of contemporary capitalism. *Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression.*:21–36.
- Gebre GG, Rahut DB. 2021. Prevalence of household food insecurity in East Africa: Linking food access with climate vulnerability. *Clim Risk Manag.* 33:100333.
- Ghafur WA, Noorkamilah, Gazali H. 2012. Resiliensi perempuan dalam bencana alam merapi: studi di Kinahrejo Umbulharjo, Cangkringan Sleman Yogyakarta, WELFARE. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Gugus Tugas COVID-19. 2021. [Internet]. Peta Sebaran | Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jakarta (ID): Gugus Tugas COVID-19. [Cited 2022 Oct 21]. Available from: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Hubeis AV. 2010. Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa. Bogor: IPB Press.
- Ibeagwa OB, Nuwawu IUA, Ukoha II, Osuji MN, Essien UA, Chikeze C, Nwachuku EU. 2020. Comparative analysis of food security status of Male and Female headed farming Households in Imo State, Nigeria. *J. Agric. Sci. Practice.* 5(5):193–201.
- ILO. 2020. World employment social outlook: trends 2020. Geneva: International labour office.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Pemerintah Republik Indonesia.
- Izzah IYU, Jazilah H. 2022. Farmer resilience in maintaining agricultural production during the COVID-19 Pandemic: A study in Solokuro Subdistrict Lamongan. *Society.* 10(1):126-140.
- Kassegn A, Abdinasir U. 2023. Determinants of rural households' livelihood diversification strategies: In the case of north Wollo zone, Amhara National Regional State, Ethiopia. *Cogent Economics & Finance.* 11(1):2185347.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. Profil Perempuan Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Khed VD, Krishna V V. 2023. Agency and time poverty: Linking decision-making powers and leisure time of male and female farmers of Central India. *World Dev Perspect.* 29:100484.
- Kumar N, Quisumbing AR. 2013. Gendered impacts of the 2007–2008 food price crisis: Evidence using panel data from rural Ethiopia. *Food Policy.* 38:11–22.
- Mariyani S, Pandjaitan NK, Sihaloho M.2019. Resilience of rainfed lowland farming communities on the threat of food insecurity due to climate change (A case in South Lampung). *Sodality.* 7(3): 236–251.
- Marseva, A. D., Putri, E. I. K., & Ismail, A. 2016. Analisis faktor resiliensi rumah tangga petani dalam menghadapi variabilitas iklim. *J Ekon dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 15–27.
- Mebratu NF. 2018. Determinants of food insecurity among rural households of South Western Ethiopia. *J Dev Agric Econ.* 10(12):404–412.
- Ndobo F, Sekhampu TJ. 2013. [internet]. Determinants of vulnerability to food insecurity in a South African township: A gender analysis. [cited 2023 Jun 8]. Available from: <https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/11337>.
- Nnaji A, Ratna NN, Renwick A. 2022. Gendered access to land and household food insecurity: Evidence from Nigeria. *Agric Resour Econ Rev.* 51(1):45–67.
- Ogunniyi AI, Omotoso SO, Salman KK, Omotayo AO, Olagunju KO, Aremu AO. 2021. Socio-economic Drivers of Food Security among Rural Households in Nigeria: Evidence from Smallholder Maize Farmers. *Soc Indic Res.* 155(2):583–599. doi:10.1007/s11205-020-02590-7.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Pradnyadewi NPR, Darmawan DP, Arisena GMK. 2021. Farmers Household Food Security in Subak Sembung During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Manajemen Agribisnis.* 9(01):346. doi:10.24843/JMA.2021.v09.i01.p10.
- Rao S, Enelamah N V. 2024. Social protection and absorptive capacity: Disaster preparedness and social welfare policy in the United States. *World Dev.* 173:106443.
- Reuters. 2022. [internet]. 13 Juta Orang Terancam Kurang Gizi Akibat Perang Rusia-Ukraina. [cited

- 2022 Oct 22]. Available from: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220630092837-92-815376/13-juta-orang-terancam-kurang-gizi-akibat-perang-rusia-ukraina>.
- Ringler C, Brian, Elizabeth. 2022. Gender-responsive investments and policies in response to the crisis brought about by Russia's war on Ukraine. Presented at the CGIAR GENDER Science Exchange, Nairobi, 12-14 October 2022.
- Riswan Y, Arifika D. 2012. Perempuan dan bencana: memberdayakan potensi sosial dan ekonomi perempuan korban banjir lahar dingin merapi, Kawistara, 2(2), 165-177
- Rodjak. 2006. Usaha Bercocok Tanam Petani. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rosales G, Mercado W. 2020. Effect of changes in food price on the quinoa consumption and rural food security in Peru. *Scientia Agropecuaria*. 11(1):83-93.
- Salmah E, Insan I, Ismiwati B, Wijimulawiani B, A MG. 2022. Working Hours of Female-Headed Households in The Informal Sector in Rensing Raya Village, West Sakra District East Lombok Regency. In: Proceedings of the 1st International Conference on Gender, Culture and Society, ICGCS 2021, 30-31 August 2021, Padang, Indonesia. EAI.
- Sariagri. 2022. [internet] Konflik Rusia-Ukraina Ancam Ketahanan Pangan. [cited 2022 Oct 22]. Available from: <https://sariagri.id/article/amp/91110/fao-konflik-rusia-ukraina-ancam-ketahanan-pangan>.
- Sasson A. 2012. Food security for Africa: an urgent global challenge. *Agric Food Secur*. 1(1):2. doi:10.1186/2048-7010-1-2.
- Sembiring ST, Dharmawan AH. 2014. Resiliensi nafkah rumah tangga petani di kawasan rawan bencana rob Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. *Sodality*. 2(1), 30-42.
- Sembiring ST. 2014. The Livelihood Resilience of Farmer Household in Rob Disaster-Prone Areas at Kampung Laut Subdistrict, Cilacap District. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 2(1).
- Shiva V. 2016. Who really feeds the world?: The failures of agribusiness and the promise of agroecology. North Atlantic Books.
- Speranza CI, Wiesmann U, Rist S. 2014. An Indicator Framework for Assessing Livelihood Resilience in the Context of Social-Ecological Dynamics. *Global Environmental Change*, 28, 109-119.
- Sucahyo N. 2022. [internet]. FAO: Perempuan Lebih Rawan Alami Kekurangan Pangan. *Voa Indonesia*. [cited 2022 Oct 21]. Available from: <https://www.voaindonesia.com/a/fao-perempuan-lebih-rawan-alami-kekurangan-pangan-/6766609.html>.
- Tibesigwa B, Visser M, Hunter L, Collinson M, Twine W. 2015. A Study of Rural Households' Reliance on Agriculture and Natural Resources to Sustain Livelihoods. *Environment for Development Initiative*. <http://www.jstor.org/stable/resrep15030>.
- UN FAO. 2017. [internet]. Driving action across the 2030 agenda for sustainable development [sustainable development goals] food and agriculture organization of the United Nations. [cited 2023 May 23]. Available from: <http://www.fao.org/3/a-i7454e.pdf>.
- UN Women. 2022. Global gendered impacts of the Ukraine crisis on energy access and food security and nutrition [Internet]. [cited 2023 May 23]. Available from: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Policy-paper-Global-gendered-impacts-of-the-Ukraine-crisis-en.pdf>.
- Vercillo S. 2020. The complicated gendering of farming and household food responsibilities in northern Ghana. *J Rural Stud*. 79:235-245.
- Wineman A. 2016. Multidimensional household food security measurement in rural Zambia. *Agrekon*. 55(3):278-301.
- Wolfson JA, Leung CW. 2020. Food Insecurity and COVID-19: Disparities in Early Effects for US Adults. *Nutrients*. 12(6):1648.
- World Bank. 2023. Food Security Update: World Bank Response to Rising Food Insecurity. Washington, DC.
- Wulandari N, Antang EU, Barbara B, Feronika E, Masliani. 2021. Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19 Di Desa Gohong Kabupaten Pulang Pisau. *Jurnal Penelitian UPR*. 1(1):1-8.
- Zakari S, Ying L, Song B. 2014. Factors Influencing Household Food Security in West Africa: The Case of Southern Niger. *Sustainability*. 6(3):1191-1202.